

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
DESA WISATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN
SOSIAL BUDAYA**

**(Studi Di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo, Kecamatan Sleman,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)**

Anggun Hendryantoro

Puspomed TNI AD

Email: anggun.dijogja@gmail.com

ABSTRACT

Community empowerment procesed with tourism village development at Brayut Pandowoharjo Tourism Village Sleman thoughg three levels, namely concept socialization level, ability transformation level, and gaining independence to managed the tourism village level. The research purposes were finding the village community's empowerment with tourism village and its implication on social culture resilience. This research was carried out with observation, interview, and analysis method and bibliography study which analyzed with deep interview system and analysis. Therefore the result of community empowerment Brayut Tourism Village should be able to involved the Brayut village community's participation started from the planning, conducting, and evaluating and continuing monitoring. Community's empowerment with tourism village development also had to strengthened social culture life as the embodiment of social culture resilience. It could be done with establishment of community institution, togetherness as the embodiment of sharing responsible, religious tolerance, custom preservation, cultural art and way of life.

Keywords: Empowerment, Tourism Village Development, Social Culture Resilience.

ABSTRAK

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo Sleman melalui tiga tahap, yaitu tahap sosialisasi konsep, tahap transformasi kemampuan, dan tahap memperoleh kemandirian dalam mengelola desa wisata. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat desa melalui desa wisata dan mengetahui implikasinya terhadap ketahanan social budaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi pustaka yang dianalisa dengan system in deep interview dan analisa. Akhirnya sebagai bentuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, Desa Wisata Brayut harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat Dusun Brayut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata juga telah memperkuat kehidupan sosial budaya sebagai bentuk ketahanan terhadap sosial budaya dengan pembentukan lembaga kemasyarakatan, kebersamaan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, toleransi kehidupan beragama, pelestarian adat istiadat, seni budaya dan cara hidup.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pengembangan Desa Wisata, Ketahanan Sosial Budaya

PENGANTAR

Latar Belakang

Semenjak reformasi terdapat perubahan kebijakan dalam paradigma pembangunan nasional, di antaranya adalah paradigma pembangunan yang bersifat terpusat (sentralistik) berubah menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah melahirkan paradigma pemberdayaan masyarakat. Melalui paradigma ini masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Paradigma ini berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Merobahnya paradigma pemberdayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan good governance (Sulistiyani, 2004; 75) Paradigma pembangunan nasional dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam segala bidang termasuk bidang kepariwisataan. Kepariwisataan diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat, di mana terdapat suatu kondisi kehidupan dinamis masyarakat yang ditandai oleh terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar, optimalnya pelaksanaan peranan dan tugas-tugas kehidupan pada setiap individu maupun kelompok, serta terselesaikannya masalah sosial melalui gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial (Papilaya, 2001)

Dewasa ini wisatawan mulai menggemari wisata alternatif yang menawarkan kegiatan wisata yang menekankan unsur-unsur pengalaman dan bentuk wisata aktif yang menonjolkan ciri budaya lokal. Oleh karena itu sejak tahun 2009 Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata untuk mengembangkan desa wisata sebagai wisata alternatif. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar wisata melalui keterlibatan masyarakat dalam memahami potensi wisata di desanya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi obyek wisata. Pengelolaan potensi desa wisata dengan baik diharapkan dapat mendorong pembangunan kepariwisataan yang berbasis masyarakat.

Pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan mengembangkan potensi desa wisata dengan mengangkat potensi sosial budaya dipercaya dapat memperkuat ketahanan sosial budaya setempat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan dengan cara *purposive sampling* dan kemudian menganalisa data tersebut menggunakan teknik *in deep interview* (Supartini, 2011)

PEMBAHASAN

Sejarah Desa Wisata Brayut

Pada tahun 1997 pemuda dusun Brayut bernama Budi Utomo yang berprofesi sebagai pengajar bahasa Indonesia di salah satu lembaga pendidikan bahasa asing mengajak mahasiswanya yang berasal dari negara lain untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Dusun Brayut. Respon masyarakat yang positif memunculkan ide kreatif untuk mengembangkan program tersebut ke

dalam bisnis pariwisata alternatif sehingga pada tanggal 14 Agustus 1999 Budi Utomo mengadakan acara peresmian Yayasan Ani-Ani.

Namun sejak tragedi Bom Bali I tahun 2002 kegiatan wisata alternatif di dusun Brayut praktis terhenti selanjutnya pada tahun 2003 Aloysius Sudarmadi mengajak pemuda-pemudi Dusun Brayut untuk mengaktifkan kembali pariwisata alternatif di Dusun Brayut. Pada bulan Agustus tahun 2004, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman meresmikan Dusun Brayut sebagai Desa Wisata dengan kantor sekretariat di Rumah Joglo milik keluarga (alm.) Mertorejo selanjutnya juga disebut Joglo Utama.

Visi Desa Wisata Brayut adalah melestarikan dan menggali nilai-nilai kearifan lokal sedangkan misi yang diemban adalah membangun perilaku masyarakat Sapta Pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan, membangun kemitraan antarwarga masyarakat dan menciptakan peluang usaha jasa pariwisata berbasis masyarakat.

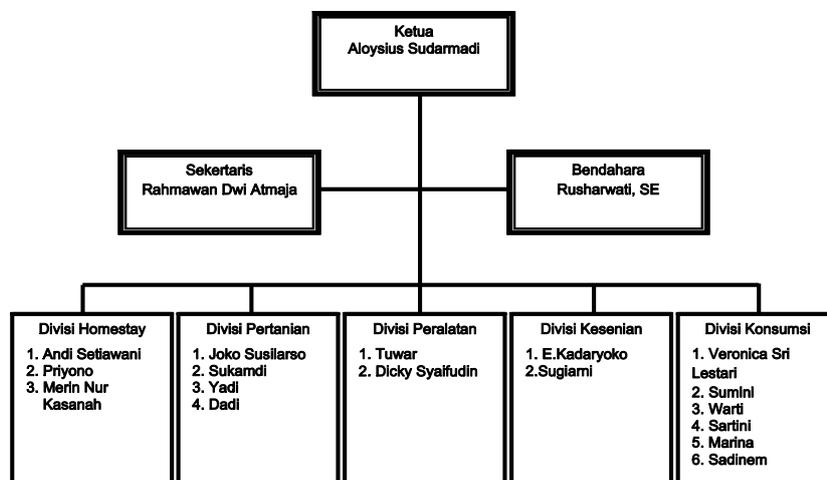
Struktur organisasi Desa Wisata Brayut terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Divisi

homestay, Divisi Pertanian, Divisi Peralatan, Divisi Kesenian, dan Divisi Konsumsi (Lihat Gambar 1)

Hubungan Organisasi Desa Wisata Dengan Lembaga Kemasyarakatan

Merujuk pada penelitian Supartini (2011; 82) bahwa organisasi desa wisata dibentuk oleh LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) maka Desa Wisata Brayut dilihat dari proses pembentukan organisasi desa wisata tidak ada hubungannya dengan LPMD Dusun Brayut. Proses pembentukan desa wisata seperti di Desa Wisata Brayut ini rentan terjadi konflik apabila keberadaan pengelola desa wisata tidak diakui atau tidak didukung oleh masyarakat. Apalagi jika kurang sosialisasi dan transparansi dalam segala hal maka dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini organisasi Desa Wisata Brayut didukung masyarakat Dusun Brayut, tercermin dalam organisasi tersebut telah diisi oleh perwakilan anggota Karang Taruna dan PKK serta masyarakat terlibat dalam kegiatan desa wisata. Organisasi Desa Wisata Brayut juga telah diakui keberadaannya oleh Pemkab, Sleman.

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Wisata Brayut



Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap sosialisasi, tahap transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian. (Muliawan, 2008). Tahap sosialisasi ini dilakukan dengan:

Pertama, kesadaran terhadap masyarakat. Sejak tahun 2004 pengelola Desa Wisata Brayut, mensosialisasikan konsep desa wisata kepada warga masyarakat untuk memperoleh dukungan. Pengelola berusaha meyakinkan warga bahwa dengan dibentuknya Dusun Brayut menjadi desa wisata budaya akan memberikan dampak ekonomi maupun sosial budaya bagi masyarakat. Dampak ekonomi yang akan dirasakan adalah peningkatan pendapatan masyarakat apabila masyarakat aktif berpartisipasi dalam wadah desa wisata dengan menyediakan rumahnya untuk akomodasi wisatawan dalam bentuk *home stay*, atau ikut aktif sebagai pemandu dalam atraksi desa wisata, sedangkan dampak sosial budaya adalah adanya peningkatan peransosialmasyarakat untuk bersama-sama menjaga seni budaya tradisional maupun memperkuat persaudaraan dengan bersama-sama menjaga dusun. Lambat laun warga menerima ide desa wisata yang dirintis pengelola Desa Wisata Brayut setelah wisatawan sering berkunjung ke Dusun Brayut dan terbukti ada timbal balik yang pantas bagi masyarakat, sehingga membuat masyarakat yang kontra menjadi mendukung konsep desa wisata.

Kedua, inventarisasi potensi wisata. Potensi wisata di Desa Wisata Brayut yang patut digali adalah potensi yang melekat pada kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Potensi tersebut menjadi keseharian warga masyarakat atau aktifitas rutin yang telah

dikemas dengan baik dan dipromosikan tepat sasaran sehingga menjadi suatu obyek wisata yang menarik. Selanjutnya pengelola desa wisata mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa wisata terutama atraksi desa wisata dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan pertanian, peternakan dan budaya seperti belajar gamelan, belajar tari, membatik kain, kesenian Jatilat/ Kuda lumping, permainan tradisional/dolanan anak, memasak dan membuat makanan tradisional, kenduri, merangkai *janur*.

Ketiga, partisipasi masyarakat. Proses pemberdayaan dapat berhasil dengan baik bila mendapat dukungan dan partisipasi dari individu maupun kelompok dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat Dusun Brayut dalam mendukung kegiatan pengembangan desa wisata dapat dilihat dari jumlah *homestay* yang pada tahun tahun 2004 hanya terdapat satu *homestay* dan pada tahun 2013 Desa Wisata Brayut sudah mempunyai 19 *homestay*. Hal ini menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat

Tahap Transformasi Kemampuan

Tahap transformasi kemampuan ini dilakukan dengan:

Pertama, bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Sejak tahun 2009 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memberikan program bantuan PNPM Mandiri Pariwisata untuk pengembangan desa wisata di Indonesia. Desa Wisata Brayut pernah menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2009, 2010 dan 2011 dengan nilai total kurang lebih Rp 155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*) yang dipergunakan peningkatan

sumber daya manusia, fasilitasi peralatan pemandu wisata dan persewaan wisata, fasilitasi peralatan kuliner, fasilitasi *homestay* dan pengembangan amenitas lainnya.

Kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Program ini untuk menciptakan masyarakat yang luas pengetahuan tentang destinasi wisata dan membentuk masyarakat yang trampil dalam mengelola organisasi desa wisata. Pelatihan dan pengembangan SDM tidak diikuti oleh warga masyarakat Brayut yang bersedia dengan sukarela mengikuti pelatihan dan pengembangan, terutama pemilik *homestay* dan seluruh pengelola Desa Wisata Brayut.

Tahap Kemandirian

Kemandirian harus dilihat dari proses pemberdayaan masyarakat, sampai di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pelaksanaannya. Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, di samping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan (Zubaidi, 2007). Pada tahapan ini ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya (Sulistiyani, 2004; 84).

Pengelola Desa Wisata Brayut menggunakan promosi sebagai strategi pemasaran agar Desa Wisata Brayut dapat dikenal konsumen. Beberapa cara yang dilakukan pengelola desa wisata sebagai bagian dari promosi adalah melalui *situs website* di internet. Selain itu Pengelola Desa

Wisata Brayut juga aktif mempromosikan desa wisata melalui *even-even* yang dihadiri massa dan *travel dialog*, yaitu kegiatan promosi pariwisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata.

Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan warga masyarakat agar lebih berdaya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumodiningrat (2000; 120) menjelaskan keberdayaan masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sedangkan Ndraha (1987; 1) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat di antaranya meliputi kegiatan perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional pembangunan, menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan dan menilai hasil pembangunan. Hasil pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Brayut dapat dicermati melalui keterlibatan/partisipasi aktif masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan program pengembangan desa wisata, pelaksanaan program pengembangan desa wisata, serta keterlibatan dalam evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan Brayut tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya desa wisata, di mana sejak awal berdiri pengelolaan desa wisata berada di tangan pendiri organisasi desa wisata sehingga perencanaan tidak dilakukan bersama seluruh warga masyarakat. Perencanaan pengembangan hanya dilakukan bersama perwakilan dari Kelompok Karang Taruna dan PKK yang tergabung dalam pengelola desa wisata. Mekanisme kegiatan

perencanaan program desa wisata yang digunakan oleh pengelola desa wisata dilakukan secara tidak langsung.

Kedua, pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata belum bisa melibatkan seluruh warga Dusun Brayut untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pengembangan desa wisata, terutama dalam atraksi kegiatan desa wisata, sehingga timbul dampak negatif berupa perasaan iri hati dan cemburu dari sebagian kecil warga masyarakat yang tidak atau belum ikut berpartisipasi. Kecemburuan ini diluapkan dengan menyampaikan pendapat seperti Dusun Brayut dijual untuk keuntungan Pengelola Desa Wisata Brayut, pengelola desa wisata diskriminatif karena hanya sebagian warga Dusun Brayut yang diajak bergabung dalam organisasi dan atraksi desa wisata dan sikap menentang atas dikembangkannya seni budaya Jatilan/Kuda Lumping karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menyikapi dampak negatif tersebut maka pengelola desa wisata Harus meningkatkan profesionalitasnya sebagai aktor pemberdaya dengan meningkatkan komunikasi dan sosialisasi yang baik, mampu bekerja sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Ketiga, evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan. Pengelola desa wisata berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang perkembangan Desa Wisata Brayut kepada masyarakat sebagai upaya transparansi organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dan monitoring hanya dilakukan intern pengelola desa wisata dan pada kasus-kasus tertentu maka pengelola melakukan

evaluasi bersama dengan pemilik *homestay* dan pelaku kegiatan, namun tidak dilakukan secara periodik. Mencermati partisipasi masyarakat Desa Wisata Brayut tersebut peneliti memandang bahwa hasil pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Brayut belum berjalan maksimal.

Kendala Pemberdayaan

Kendala dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Brayut tampak dalam tahap sosialisasi, tahap transformasi kemampuan, tahap kemandirian.

Kendala yang ada pada tahap sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, komunikasi dan koordinasi. Pengelolaan yang baik terlihat dari cara komunikasi yang baik. Menurut pengamatan peneliti masih terlihat kurangnya komunikasi antara pengelola Desa Wisata Brayut dengan warga masyarakat, pengelola dengan tokoh-tokoh masyarakat dusun sehingga kadangkala masih terdapat kekurangpercayaan terhadap pengelola desa wisata. Satu hal yang melatarbelakangi kurangnya komunikasi ini adalah proses pembentukan desa wisata itu sendiri yang tidak melibatkan elemen-elemen masyarakat terutama lembaga-lembaga dusun.

Kedua, sikap dan perilaku masyarakat. Sikap dan perilaku masyarakat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang muaranya pada tingkat pemahaman dan perasaan membutuhkan aktualisasi diri. Pada tahap sosialisasi ini, pengelola desa wisata kesulitan untuk mengajak warga masyarakat selain karena jumlah kegiatan atraksi wisata yang belum bisa merangkul semua warga juga pengaruh sikap dan perilaku masyarakat.

Kendala Tahap Transformasi Kemampuan

Kendala yang ada pada tahap transformasi kemampuan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, keterbukaan dan transparansi. Di jaman globalisasi yang menuntut keterbukaan informasi menjadi penting dalam pengembangan desa wisata. Sebagai sebuah langkah pemberdayaan masyarakat seyogyanya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan program pengembangan desa wisata. Pengelola Desa Wisata mengkomunikasikan rencana dan program desa wisata melalui rapat bersama Kepala Dusun maupun Lembaga Dusun serta warga masyarakat sehingga terdapat keterlibatan warga dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Transparansi dalam administrasi bidang pencatatan pemasukan dan pengeluaran juga penting untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan yang berindikasi pada penggelapan.

Kedua, kurangnya sumber daya manusia terlatih. Desa Wisata Brayut dengan berbagai kegiatan budaya masih kurang kaderisasi untuk pemandu-pemandu yang membutuhkan sumber daya yang terlatih. Hal ini terlihat pada beberapa atraksi wisata seperti belajar gamelan, kerawitan, dan belajar tari tradisional.

Ketiga, kurangnya pemandu wisata. Jumlah pemandu wisata kadangkala tidak sebanding dengan jumlah wisatawan yang datang berombongan. Pengelola desa wisata perlu memberdayakan masyarakat untuk menambah jumlah pemandu wisata sebagai bentuk pengembangan desa wisata yang berbasis partisipasi masyarakat.

Keempat, ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata. Ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata menjadi penting untuk meningkatkan kepuasan wisatawan.

Atraksi wisata di Desa Wisata Brayut perlu ditunjang dengan kelengkapan sarana prasana atraksi wisata seperti pada alat perlengkapan membuat, tempat kondusif pada atraksi yang bersifat demo dan resume kegiatan atraksi yang menjelaskan dan menggambarkan makna-makna kearifan lokal. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata akan wisata mempermudah pemandu dalam memandu atraksi wisata

Kelima, dana pengembangan. Anggaran desa wisata tidak didukung oleh pemerintah daerah karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang desa wisata, sehingga promosi menjadi ujung tombak untuk menggaet wisatawan. Pengelola desa wisata harus dapat memanfaatkan pendapatan secara efektif dan efisien untuk operasional dan pengembangan desa wisata.

Kendala Tahap Kemandirian

Kendala yang ada pada tahap kemandirian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Tingkat pemahaman masyarakat Dusun Brayut tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata masih belum merata. Hal ini perlu sosialisasi yang terus menerus dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

Kedua, belum melibatkan seluruh warga masyarakat. Idealnya dalam pemberdayaan masyarakat, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan

secara partisipatif. Banyak warga masyarakat yang belum terlibat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Dusun Brayut.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya

Implikasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata terhadap ketahanan sosial budaya dapat dijelaskan sebagai berikut; (Lemhannas, 2009)

Pertama, pembentukan lembaga kemasyarakatan. Dusun Brayut dikenal sebagai dusun yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan budaya. Pembentukan kelembagaan masyarakat ini merupakan bentuk kontribusi swadaya masyarakat dalam perkuatan kehidupan sosial dan budaya sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pengembangan desa wisata di dusunnya. Kelembagaan masyarakat yang ada di Brayut dan berjalan seiring dengan pengembangan desa wisata saat ini yaitu: Kelompok Ternak Sumber Ayu, Sanggar Kerawitan Merdiko Laras, Sanggar tari Sekar Arum, Kelompok Tani, Kelompok simpan pinjam warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tingkat dusun, Karang taruna, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kedua, kebersamaan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Gotong royong merupakan wujud kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan kebersamaan merupakan salah satu hakikat kemanusiaan. Sebagai desa wisata budaya maka nilai gotong royong terus dilestarikan sebagai potensi yang berkembang dalam masyarakat.

Ketiga, toleransi kehidupan beragama. Desa Wisata Brayut hidup dalam toleransi

beragama yang kental dan terjaga. Hidup beragama yang toleran sekaligus menjadi sikap dasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Desa Wisata Brayut menyadari bahwa toleransi merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat.

Keempat, pelestarian adat istiadat, budaya dan cara hidup. Sangsi sosial sebagai aturan tidak tertulis digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang sudah berjalan baik di Desa Wisata Brayut. Pengembangan desa wisata telah memberi kesadaran bagi warga Dusun Brayut bahwa kehidupan masyarakat dengan melestarikan adat istiadat dan budaya tradisional seperti upacara kenduri, taritarian, jatilan, membatik, kuliner tradisional, tata cara pertanian tradisional dan rumah-rumah tradisional dapat memberikan kesempatan kerja untuk warga dan membangkitkan perekonomian warga.

SIMPULAN

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Dusun Brayut Pandowoharjo Sleman melalui tiga tahap yaitu sosialisasi, transformasi kemampuan dan kemandirian desa wisata. Akhirnya sebagai bentuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, Desa Wisata Brayut harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat Dusun Brayut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan

Kendala-kendala yang dihadapi dalam tiap tahapnya sebagai berikut: (1) Tahap sosialisasi meliputi komunikasi dan koordinasi, sikap dan perilaku masyarakat. (2) Tahap transformasi

kemampuan meliputi keterbukaan dan transparansi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya pemandu wisata, ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata dan dana pengembangan. (3) Tahap kemandirian meliputi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan belum melibatkan seluruh warga masyarakat

Penguatan kehidupan sosial budaya sebagai bentuk ketahanan sosial budaya ditandai dengan pembentukan lembaga kemasyarakatan, kebersamaan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, toleransi kehidupan beragama dan pelestarian adat istiadat, budaya dan cara hidup.

Pada tahap sosialisasi: (1) Memperkuat komunikasi dan koordinasi, di antara pengelola desa wisata dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan tingkat dusun serta dengan warga masyarakat, untuk meningkatkan daya dukung bagi pengembangan desa wisata di masa datang. (2) Mensosialisasikan program desa wisata secara terus menerus agar masyarakat paham dan mengerti manfaatnya selanjutnya masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif.

Pada tahap transformasi kemampuan: (1) Meningkatkan keterbukaan dan transparansi program desa wisata kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan pengembangan yang intensif, bertahap dan berkelanjutan. (3) Melengkapi sarana dan prasarana atraksi wisata serta memperbanyak pemandu wisata dalam upaya pelayanan prima kepada wisatawan. (4) Memperkuat manajemen organisasi desa wisata serta membangun komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dengan *stakeholders*.

Pada tahap kemandirian: (1) Memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata secara komprehensif kepada seluruh warga masyarakat. (2) Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sebagai bentuk perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dalam upaya meningkatkan kualitas atraksi wisata, memperbanyak fasilitas kegiatan dan atraksinya sehingga mampu meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan yang pada akhirnya mampu melibatkan warga masyarakat sebanyak-banyaknya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Lemhanas. 2009. *Konsepsi dan Tolak Ukur Ketahanan Nasional*, tanpa kota: tanpa penerbit.
- Muliawan, H. 2008. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep dan Implementasi*. tanpa kota: tanpa penerbit.
- Ndraha, T.1987. *Pengembangan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Papilaya. 2001. *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: CV. Sinar Dunia
- Sulistiyani, A,T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, G. 2000. *Visi dan Misi Peembangunan Pertanian Berbasil Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA.
- Supartini, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Ketingan Tirtoadi Mlati Kab. Sleman DIY*. Tesis Tidak Diterbitkan: UGM
- Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.